

TANTANGAN DAN PELUANG PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN SOSIAL DAN TEKNOLOGI DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Muhammad Imam Fahrizal^{1*}, Muhammad Zaki Al Ghifari², Muhammad Dilan Ramadhan³,
Muhammad Rafli Lingga Putra Sukmana⁴, Muhammad Fadhlan Akbar⁵, Ratna Fitria⁶
Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia.

E-mail: imamfahrizal02@upi.edu zakialghifari566@gmail.com dilanramdhan2005@gmail.com
linggasukmana14@gmail.com fadlanyeager7@gmail.com

Abstract

This study examines the challenges and opportunities of Citizenship Education (PKn) at Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) in responding to social and technological changes, where PKn plays a crucial role in shaping character and national identity, especially in the digital era. Using a quantitative approach, an online survey was conducted with 60 students enrolled in PKn courses to explore their perceptions of the relevance of PKn, the challenges faced, and their hopes for its development. The results indicate that over 90% of students are aware of the impact of digital technology on their understanding of citizenship values; however, more than half feel less interested in national issues due to the dominance of social media and low digital literacy. The main challenges include the prevalence of hoaxes, a lack of understanding of digital ethics, and the mismatch between PKn content and real social conditions. Nevertheless, there are opportunities to make PKn more engaging through the utilization of digital technology and social media, as well as enhancing digital literacy and critical thinking. Students desire adaptive and experiential learning in PKn. This research recommends innovative and collaborative learning strategies, including digital literacy training and public discussions, to cultivate a smart and responsible youth generation in the digital era, with the hope that these findings can serve as a reference for educational policy and the development of PKn in higher education.

Keywords: Citizenship Education, Digital Literacy, Social Change, Higher Education, Technological Progress.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tantangan dan peluang Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi, di mana PKn berperan penting dalam membentuk karakter dan identitas nasional, terutama di era digital. Dengan pendekatan kuantitatif, survei daring dilakukan kepada 60 mahasiswa yang mengambil mata kuliah PKn untuk mengeksplorasi persepsi mereka tentang relevansi PKn, tantangan yang dihadapi, dan harapan untuk pengembangannya. Hasil menunjukkan bahwa lebih dari 90% mahasiswa menyadari dampak teknologi digital terhadap pemahaman nilai kewarganegaraan, tetapi lebih dari setengahnya merasa kurang tertarik pada isu kebangsaan akibat dominasi media sosial dan rendahnya literasi digital. Tantangan utama yang dihadapi mencakup maraknya hoaks, kurangnya pemahaman etika digital, dan ketidaksesuaian materi PKn dengan kondisi sosial nyata. Meskipun demikian, terdapat peluang untuk membuat PKn lebih menarik melalui pemanfaatan teknologi digital dan media sosial, serta peningkatan literasi digital dan berpikir kritis. Mahasiswa menginginkan pembelajaran PKn yang adaptif dan berbasis pengalaman nyata. Penelitian ini merekomendasikan strategi pembelajaran inovatif dan kolaboratif, termasuk pelatihan literasi digital dan diskusi publik, untuk membentuk generasi muda yang cerdas dan bertanggung jawab di era digital, dengan harapan temuan ini dapat menjadi acuan dalam kebijakan pendidikan dan pengembangan PKn di perguruan tinggi.

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Literasi Digital, Perubahan Sosial, Pendidikan Tinggi, Kemajuan Teknologi.

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No 453

Prefix DOI: Prefix DOI:

10.8734/sindoro.v1i2.360

Copyright: Author

Publish by: SINDORO



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu pembelajaran yang berfokus dalam membentuk warga negara Indonesia yang baik dan cerdas (Agil Nanggala, 2020). Pendidikan adalah suatu tahapan yang didalamnya dilakukan secara berkelanjutan dan bertujuan untuk memanusiakan manusia agar terdapat arah yang bertujuan untuk membantu mahasiswa ketika masuk dalam lingkungan masyarakat (I Made Dharma Atmaja, 2020).

Keberlangsungan suatu bangsa tidak akan berjalan secara lancar apabila tidak adanya andil dari seorang warga negara, sehingga pembentukan warga negara perlu diberikan sejak dini agar warga negara dapat terbentuk menjadi insan yang mengerti akan pentingnya menjaga harkat dan martabat suatu bangsa yang dapat dilakukan dengan proses pembelajaran dan pembinaan potensi diri pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pembelajaran secara individu agar menjadi warga negara yang patuh dan taat terhadap nilai-nilai yang berkenaan dengan ranah kelembagaan negara adalah cara yang sangat ampuh dalam menerapkan sistem Pendidikan Kewarganegaraan saat ini agar generasi milenial di era modern ini tidak terlalu acuh terhadap cita-cita negara yang perlu mereka lanjutkan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pembelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan sangat penting untuk membentuk, melatih, membudayakan, dan sebagai stimulus dalam membuka sudut pandang dan wawasan warga negara dalam berpikir kritis serta bertingkah laku karena di dalamnya memuat aspek-aspek pengajaran yang baik dan dilaksanakan secara profesional demi meningkatkan keterampilan sosio kultural, pembentukan nilai moral, dan budi pekerti (Wafa Khairunisa, 2023).

Sehingga dari permasalahan tersebut memang jelas kiranya Pendidikan Kewarganegaraan ini terkadang dianggap kurang penting dikalangan generasi sekarang, hal inilah yang menjadi paradigma baru terlebih generasi penerus bangsa sudah seharusnya memiliki karakter nasionalisme yang kental akan syarat Pancasila dimana hal-hal tersebut secara teori adalah teori substansial dari pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Dengan demikian tentu hal ini menjadi permasalahan yang kompleks bagi generasi bangsa di masa yang akan datang nantinya karena dengan kurangnya pemahaman tentang pendidikan kewarganegaraan tentu akan memiliki pengaruh besar pada lemahnya karakter generasi penerus bangsa akan nilai-nilai luhur bangsanya. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan melibatkan berbagai pihak sehingga tujuan pembentukan karakter generasi penerus bangsa yang memiliki kesadaran kewarganegaraan yang kuat dapat tercapai dengan baik (Shella Rachmawaty, 2023).

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan identitas suatu bangsa, terutama di era modern yang dipengaruhi berbagai tantangan sosial serta perkembangan teknologi yang sangat pesat. Banyak penelitian sebelumnya yang telah menyelidiki pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan. Dikatakan bahwa nilai-nilai Pancasila yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sangatlah banyak, termasuk karakter yang berasal dari hati yaitu beriman kepada tuhan, taat hukum, tertib, patriotik, serta pantang menyerah.

Kepribadian pancasila sangat penting dalam berurusan dengan kehidupan. Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun karakter pancasila dalam masyarakat sosial ini sangatlah penting untuk meminimalisir dari pengaruh perkembangan teknologi serta pengaruh perubahan sosial yang ada di masa modern (Anindita Putri Kirani, 2022).

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tantangan dan peluang Pendidikan Kewarganegaraan dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi di kalangan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, mengidentifikasi berbagai permasalahan yang ada, serta mencari solusi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kehidupan di lingkungan masyarakat dan bernegara. Penelitian ini akan menganalisis berbagai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Pendidikan Kewarganegaraan di era modern serta

memiliki tujuan untuk meningkatkan metode pengajaran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas Pendidikan Kewarganegaraan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui pandangan mahasiswa terhadap tantangan dan peluang Pendidikan Kewarganegaraan dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada data berupa angka yang diperoleh dari penyebaran kuesioner. Pengumpulan data dilakukan melalui Google Form yang dibagikan secara daring kepada responden, yaitu mahasiswa dari berbagai program studi. Kuesioner tersebut disusun dalam bentuk pilihan ganda dan skala Likert (1-5) untuk menggambarkan tingkat persetujuan terhadap berbagai pernyataan yang telah disiapkan. Topik-topik dalam kuesioner mencakup persepsi terhadap materi Pendidikan

Kewarganegaraan, relevansi terhadap isu-isu sosial dan teknologi, serta harapan mahasiswa terhadap pengembangan pendidikan ini ke depannya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik non-probability sampling, lebih tepatnya purposive sampling, karena responden yang dipilih adalah mahasiswa yang sedang atau pernah mengikuti mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Jumlah responden yang berhasil dikumpulkan sebanyak 60 orang responden. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menyajikan hasil dalam bentuk persentase, diagram, dan interpretasi sederhana untuk memudahkan pemahaman terhadap data. Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran nyata tentang bagaimana mahasiswa melihat peran Pendidikan Kewarganegaraan di tengah arus perubahan sosial dan perkembangan teknologi yang cepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui kuesioner online yang disebarakan menggunakan *Google Form*. Dari hasil penyebaran tersebut, terkumpul sebanyak 60 responden yang semuanya merupakan mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelum dianalisis, data yang masuk telah melalui proses verifikasi terlebih dahulu untuk memastikan validitasnya dan menghindari adanya jawaban yang tidak sesuai atau ganda, agar hasil analisis lebih akurat. Untuk memberikan gambaran umum tentang karakteristik sampel dalam penelitian ini, profil responden dianalisis berdasarkan beberapa kategori, seperti jenis kelamin, tahun angkatan, nomor induk mahasiswa (NIM), jurusan, dan pertanyaan pilihan ganda dan essay yang akan di jawab oleh para responden.

Tabel 1. Data Hasil Responden Mahasiswa Mengenai Tantangan dan Peluang Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Menghadapi Perubahan Sosial dan Teknologi

No	Pertanyaan	Pengelompokan	Frekuensi	%
1.	Perkembangan teknologi digital berdampak besar terhadap cara mahasiswa memahami nilai-nilai kewarganegaraan	A. Sangat Setuju B. Setuju C. Netral D. Tidak Setuju E. Sangat Tidak Setuju	25 31 4 1 -	41% 50,8% 6,6% 1,6% -

2.	Mahasiswa saat ini cenderung kurang tertarik pada isu-isu kebangsaan karena lebih fokus pada media sosial	A. Sangat Setuju B. Setuju C. Netral D. Tidak Setuju E. Sangat Tidak Setuju	18 21 17 1 4	29,5% 34,4% 27,9% 1,6% 6,6%
3.	Pendidikan kewarganegaraan harus lebih interaktif dan berbasis teknologi agar menarik bagi mahasiswa	A. Sangat Setuju B. Setuju C. Netral D. Tidak Setuju E. Sangat Tidak Setuju	 26 26 7 - -	44,1% 44,1% 11,9% - -
4.	Penyebaran informasi palsu di media sosial merupakan tantangan dalam pendidikan kewarganegaraan	A. Sangat Setuju B. Setuju C. Netral D. Tidak Setuju E. Sangat Tidak Setuju	32 24 4 - -	53,3% 40% 4% - -
5.	Pendidikan kewarganegaraan yang saya terima sudah cukup relevan dengan kondisi zaman sekarang	A. Sangat Setuju B. Setuju C. Netral D. Tidak Setuju E. Sangat Tidak Setuju	16 27 19 3 1	16,7% 31,7% 45% 5% 1,7%
6.	Saya merasa penting untuk memahami etika digital dalam konteks berwarganegara	A. Sangat Setuju B. Setuju C. Netral D. Tidak Setuju E. Sangat Tidak Setuju	31 23 6 - -	51,7% 38,3% 10% - -
7.	Saya lebih tertarik membahas isu sosial politik jika disampaikan melalui media digital	A. Sangat Setuju B. Setuju C. Netral D. Tidak Setuju E. Sangat Tidak Setuju	11 24 23 2 -	18,3% 40% 38,3% 3,3% -
8.	Kurangnya literasi digital membuat mahasiswa rentan	A. Sangat Setuju B. Setuju	26 29	44,1% 49,2%
	terhadap informasi yang menyesatkan	C. Netral D. Tidak Setuju E. Sangat Tidak Setuju	4 - -	6,8% - -

Berdasarkan data pada Tabel 1 yang diperoleh dari 60 responden, berikut adalah gambaran umum dari hasil kuesioner mengenai pandangan mahasiswa terhadap tantangan dan peluang Pendidikan Kewarganegaraan di tengah perubahan sosial dan teknologi:

1. Pengaruh Teknologi Digital terhadap Pemaknaan Nilai-nilai Kewarganegaraan

Mayoritas responden (91,8%) menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa perkembangan teknologi digital berdampak besar terhadap cara mahasiswa memaknai nilai-nilai kewarganegaraan. Hasil ini mengindikasikan bahwa teknologi telah menjadi ruang baru pembentukan karakter kewarganegaraan. Hal ini selaras dengan pandangan Castells (2009) dalam Network Society Theory, yang menyatakan bahwa masyarakat kini hidup dalam jaringan informasi, di mana nilai-nilai sosial, termasuk kewarganegaraan, turut terbentuk dan berubah dalam interaksi digital. Mahasiswa tak hanya menerima informasi dari institusi pendidikan, tetapi juga dari algoritma media sosial, forum diskusi, dan komunitas daring. Artinya, teknologi menjadi salah satu aktor penting dalam transformasi identitas kewarganegaraan generasi muda.

2. Ketertarikan Mahasiswa terhadap Isu Kebebasan di Media Sosial

Sebanyak 57,4% responden tertarik dengan isu-isu kebebasan yang sering muncul di media sosial. Ketertarikan ini bisa dibaca sebagai bentuk kesadaran politik mahasiswa yang berkembang secara informal melalui media digital. Sesuai dengan gagasan Habermas tentang public sphere, media sosial saat ini telah menjadi arena diskusi demokratis di mana warga negara dapat menyuarakan pendapat dan menanggapi isu sosial secara langsung. Namun, data juga menunjukkan bahwa masih ada kelompok yang netral dan tidak setuju, menandakan bahwa tidak semua mahasiswa aktif atau nyaman dalam diskusi terbuka di media digital—kemungkinan karena faktor privasi, polarisasi opini, atau tekanan sosial daring (online social pressure).

3. Harapan terhadap Pembelajaran Kewarganegaraan yang Interaktif dan Digital-Friendly

Responden dengan tegas menyatakan keinginan agar Pendidikan Kewarganegaraan menjadi lebih interaktif dan berbasis teknologi (85,2% setuju dan sangat setuju). Ini menunjukkan adanya keinginan mahasiswa untuk tidak hanya menjadi penerima materi pasif, tetapi juga partisipan aktif dalam proses pembelajaran. Teori Vygotsky dan prinsip student-centered learning menekankan pentingnya konteks sosial dan media yang relevan dalam proses pendidikan. Penggunaan media digital dalam pembelajaran kewarganegaraan dapat menjembatani antara teori yang diajarkan di kelas dengan realitas sosial yang dihadapi mahasiswa setiap hari, seperti praktik diskusi, voting online, atau simulasi kebijakan publik.

4. Tantangan Penyebaran Hoaks dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Data menunjukkan 93,3% mahasiswa menganggap penyebaran informasi palsu (hoaks) sebagai tantangan serius. Ini sejalan dengan temuan Media Literacy Education yang menyatakan bahwa generasi muda rentan terhadap informasi bias jika tidak dibekali kemampuan berpikir kritis dan literasi media. Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan, tantangan ini harus dijawab dengan pendekatan yang menanamkan kemampuan critical thinking, verifikasi informasi, dan etika digital, sehingga mahasiswa tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen dan penjaga nilai kebenaran dalam ruang digital.

5. Evaluasi terhadap Relevansi Pendidikan Kewarganegaraan Saat Ini

Sebanyak 48,4% responden setuju bahwa pendidikan kewarganegaraan yang mereka terima saat ini cukup relevan, namun terdapat 33,3% yang bersikap netral. Ini menjadi refleksi bahwa masih terdapat jarak antara kurikulum yang diajarkan dengan dinamika sosial yang dialami mahasiswa. Freire (1970) dalam *Pedagogy of the Oppressed* menekankan pentingnya pendidikan yang dialogis dan kontekstual, di mana peserta didik diajak untuk menjadi subjek yang memahami dan mengubah realitas sosialnya, bukan sekadar objek yang dijejali materi normatif.

6. Urgensi Etika Digital dalam Pembentukan Warga Negara Digital

Sebagian besar mahasiswa (81,7%) menganggap pentingnya pemahaman etika digital. Dalam era di mana aktivitas sosial, politik, bahkan budaya berlangsung secara daring, etika digital menjadi elemen penting dalam pembentukan karakter warga negara. Ini mencakup kesadaran akan jejak digital, tanggung jawab berkomunikasi di ruang publik, hingga empati terhadap perbedaan pendapat. Konsep ini sejalan dengan ide Digital Citizenship oleh Ribble (2011), yang menekankan tanggung jawab, keamanan, dan etika dalam penggunaan teknologi.

7. Keterbukaan terhadap Isu Sosial-Politik di Media Digital

Menariknya, hanya 48,3% mahasiswa yang menyatakan tertarik membahas isu sosial-politik jika disampaikan lewat media digital. Ini menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi membuka akses, tidak semua mahasiswa merasa nyaman berdiskusi di ruang daring. Bisa jadi karena budaya debat yang tidak sehat di media sosial, kekhawatiran akan doxing, atau kurangnya moderasi diskusi. Hal ini menegaskan bahwa digitalisasi saja tidak cukup; perlu ada edukasi mengenai safe space digital dan literasi diskusi publik yang sehat.

8. Kesadaran akan Kebutuhan Literasi Digital untuk Mencegah Misinformasi

Terakhir, 70,8% responden menyadari pentingnya literasi digital untuk menyaring informasi menyesatkan. Hal ini menjadi sinyal bahwa mahasiswa menyadari kelemahan mereka di era banjir informasi (infodemic). Maka, Pendidikan Kewarganegaraan di era digital harus mencakup pelatihan kemampuan membaca kritis, mengenali bias, serta menggunakan sumber informasi yang kredibel— ini merupakan bagian integral dari literasi kewarganegaraan modern. Dan ada dua pertanyaan esai mengenai tanggapan atau saran tentang tantangan dan peluang kewarganegaraan dalam menghadapi perubahan sosial, untuk membantu kami mengisi simpulan dan saran dan agar responden menjawab dengan berfikir dan berfikir kritis untuk menjawab pertanyaan nya yang mengenai tantangan dan peluang kewarganegaraan dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi. Berikut adalah pertanyaan dengan jawaban yang responden isi:

1. Apa saran anda untuk meningkatkan efektivitas Pendidikan kewarganegaraan dalam merespon perubahan sosial dan teknologi?

Berdasarkan hasil kuesioner terbuka, sebagian besar responden menyarankan agar Pendidikan Kewarganegaraan lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang cepat. Salah satu saran yang paling menonjol adalah integrasi teknologi digital ke dalam proses pembelajaran. Responden mengusulkan penggunaan media sosial, platform pembelajaran daring, video edukatif, serta simulasi digital sebagai cara yang lebih efektif untuk menyampaikan materi. Ini sejalan dengan penelitian dari O'Brien dan Scharber (2008) yang menyatakan bahwa penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan partisipasi dan motivasi siswa dalam memahami isu-isu sosial dan politik secara kontekstual.

Selanjutnya, penguatan literasi digital dan berpikir kritis juga menjadi fokus penting. Banyak responden menekankan pentingnya siswa memiliki kemampuan untuk menyaring informasi, menghindari hoaks, serta memahami etika bermedia sosial. Hal ini sejalan dengan teori Digital Citizenship dari Ribble (2011), yang menyebutkan bahwa peserta didik harus dilatih tidak hanya dalam penggunaan teknologi, tetapi juga dalam berpikir etis dan bertanggung jawab sebagai warga negara digital.

Beberapa responden juga menyoroti perlunya pembaruan kurikulum agar materi Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya mengajarkan konsep normatif seperti konstitusi dan Pancasila, tetapi juga mencakup isu kontemporer seperti hak digital, demokrasi di era media sosial, kecerdasan buatan (AI), dan tantangan global seperti perubahan iklim dan kesetaraan gender. Menurut Banks (2008), pendidikan kewarganegaraan yang inklusif dan relevan dengan kondisi sosial akan lebih berhasil dalam membentuk warga negara yang aktif dan kritis.

Selain itu, metode pembelajaran yang interaktif seperti project-based learning, diskusi kelompok, studi kasus, debat, dan permainan peran juga disarankan untuk menggantikan

metode ceramah yang masih dominan. Model pembelajaran semacam ini dinilai lebih aplikatif dan mampu mendorong siswa untuk berperan aktif dalam memecahkan masalah sosial. Penelitian oleh Thomas (2000) mendukung pendekatan ini, menyatakan bahwa project-based learning membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan sosial dan berpikir reflektif dalam konteks dunia nyata.

Tidak hanya itu, responden juga menekankan perlunya pelatihan dan pengembangan profesional guru, agar tenaga pendidik mampu mengikuti perkembangan teknologi dan mengemas materi pembelajaran secara menarik dan relevan. Guru diharapkan dapat menjadi fasilitator yang adaptif, bukan hanya penyampai materi. Ini sejalan dengan pandangan Darling-Hammond et al. (2017) yang menekankan bahwa pengembangan kapasitas guru sangat krusial untuk mendukung pembelajaran abad ke-21.

Terakhir, beberapa responden menyarankan adanya pelibatan masyarakat dan lembaga eksternal seperti organisasi sosial, komunitas digital, dan dunia industri agar proses belajar tidak hanya berlangsung di kelas, tetapi juga menjangkau kehidupan nyata. Kolaborasi ini penting agar nilai-nilai kewarganegaraan tidak hanya diajarkan, tapi juga dipraktikkan secara langsung dalam konteks sosial yang nyata.

2. menurut anda, apa saja peluang yang busa dimanfaatkan dari teknologi digital untuk memperkuat Pendidikan kewarganegaraan?

Berdasarkan tanggapan responden, terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan dari kemajuan teknologi digital untuk memperkuat pendidikan kewarganegaraan di era modern. Salah satu peluang yang paling banyak disebut adalah akses informasi yang luas dan cepat. Teknologi digital memungkinkan siswa untuk mengakses berbagai sumber informasi tentang isu-isu kewarganegaraan secara real-time, dari berbagai perspektif, baik lokal maupun global. Ini sejalan dengan pendapat Westheimer & Kahne (2004) bahwa keterlibatan warga negara yang aktif sangat dipengaruhi oleh ketersediaan informasi dan keterampilan berpikir kritis dalam memilahnya.

Responden juga menekankan pentingnya penguatan literasi digital dan etika bermedia sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan. Literasi digital tidak hanya soal kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga memahami, mengevaluasi, dan merespons informasi dengan bijak. Ribble (2011) dalam konsep Digital Citizenship menyebutkan bahwa pendidikan perlu membentuk warga digital yang bertanggung jawab, etis, dan sadar akan hak serta kewajiban di ruang digital.

Selanjutnya, teknologi juga membuka ruang untuk pembelajaran yang interaktif dan berbasis simulasi. Banyak responden menyarankan penggunaan platform seperti e-learning, video edukatif, game edukatif, hingga simulasi sidang parlemen virtual atau e-voting untuk membuat pembelajaran kewarganegaraan lebih menarik dan aplikatif. Menurut penelitian oleh Dabbagh & Kitsantas (2012), pembelajaran berbasis teknologi dapat meningkatkan keterlibatan, motivasi, serta pemahaman siswa terhadap materi kompleks, termasuk nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

Teknologi digital juga membuka jalan untuk kolaborasi lintas budaya dan wilayah, yang dinilai penting dalam membentuk wawasan kebangsaan yang inklusif dan toleran. Melalui diskusi daring, proyek kolaboratif, atau forum digital, siswa bisa berinteraksi langsung dengan orang-orang dari latar belakang berbeda. Hal ini sejalan dengan gagasan multicultural civic education yang dikembangkan oleh Banks (2008), yang menyarankan pendidikan kewarganegaraan harus berorientasi pada keberagaman dan global citizenship.

Beberapa responden juga menyoroti potensi media sosial sebagai sarana kampanye dan penyadaran nilai-nilai kewarganegaraan. Dengan pendekatan yang kreatif dan komunikatif, media sosial dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan kebangsaan, mendorong partisipasi publik, serta membentuk opini yang sehat dalam demokrasi digital. Hal ini diperkuat

oleh penelitian McCosker (2015) yang menyebut media sosial sebagai ruang penting bagi partisipasi warga dalam politik dan pendidikan sipil digital.

Terakhir, teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Responden percaya bahwa melalui pemanfaatan teknologi, siswa dapat lebih aktif dalam menganalisis isu sosial, hukum, dan politik. Ini merupakan kunci dalam membentuk warga negara yang tidak hanya tahu hak dan kewajibannya, tetapi juga mampu terlibat aktif dalam menyelesaikan persoalan publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi terhadap 60 mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menghadapi berbagai tantangan sekaligus peluang di tengah dinamika sosial dan kemajuan teknologi digital. Sebagian besar responden menyadari bahwa perkembangan teknologi memengaruhi cara mereka memahami serta menginternalisasi nilai-nilai kewarganegaraan, dan di saat yang sama menciptakan ruang baru dalam pembentukan karakter serta jati diri bangsa di era digital. Meskipun demikian, minat mahasiswa terhadap isu-isu kebangsaan masih tergolong rendah, sebagian besar karena fokus yang berlebihan pada media sosial, ditambah dengan maraknya penyebaran informasi palsu dan lemahnya literasi digital.

Mahasiswa berpandangan bahwa PKn perlu lebih adaptif, interaktif, dan memanfaatkan teknologi agar pembelajaran lebih sesuai dengan tuntutan zaman. Mereka juga menyoroti pentingnya pendidikan etika digital sebagai bagian dari proses pembentukan warga negara yang bertanggung jawab dalam lingkungan digital. Meskipun digitalisasi membuka akses lebih luas terhadap diskusi sosial-politik, tidak semua mahasiswa merasa percaya diri atau tertarik untuk terlibat aktif, sehingga pendekatan pembelajaran yang lebih inklusif dan edukatif sangat dibutuhkan.

Secara keseluruhan, PKn masih dipandang relevan dengan konteks kekinian, tetapi terdapat ketimpangan antara materi pembelajaran dengan realitas sosial yang dihadapi mahasiswa. Ini menegaskan pentingnya pembaruan kurikulum dan pendekatan pembelajaran yang lebih kontekstual dan berbasis dialog, agar mahasiswa mampu berperan aktif dalam merespons tantangan sosial dan teknologi yang berkembang.

Pendidikan Kewarganegaraan perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran, seperti melalui media sosial, platform daring, maupun konten audiovisual edukatif, agar penyampaian materi menjadi lebih menarik dan mudah dipahami oleh mahasiswa. Kurikulum PKn juga harus diperkuat dengan materi literasi digital dan keterampilan berpikir kritis guna membekali mahasiswa dalam menghadapi derasnya arus informasi dan menghindari penyebaran hoaks.

Model pembelajaran sebaiknya lebih interaktif dan melibatkan partisipasi aktif mahasiswa, misalnya melalui diskusi daring, simulasi perumusan kebijakan publik, serta proyek sosial berbasis teknologi digital yang relevan dengan pengalaman mereka. Penerapan etika digital juga perlu ditanamkan secara sistematis dalam pembelajaran PKn, agar mahasiswa memiliki kesadaran akan tanggung jawab, keamanan, dan etika dalam berinteraksi di dunia maya. Terakhir, kolaborasi antara dosen, mahasiswa, dan pihak eksternal seperti praktisi teknologi dan media, perlu diperkuat untuk menciptakan lingkungan belajar yang kontekstual, adaptif, dan responsif terhadap perubahan sosial dan kemajuan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agil Nanggala. (2020). Citizenship education as a democracy learning for students in higher education. *IJECA (International Journal of Education and Curriculum Application)*, 3(1), 69-80. <https://doi.org/10.31764/ijeca.v3i1.2067>
- Atmaja, I. M. D. (2020). *Implementasi strategi pembelajaran "What-If"*. Deepublish.

- Banks, J. A. (2008). Diversity, group identity, and citizenship education in a global age. *Educational Researcher*, 37(3), 129-139. <https://doi.org/10.3102/0013189X08317501>
- Castells, M. (2009). *Communication power* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Dabbagh, N., & Kitsantas, A. (2012). Personal learning environments, social media, and self-regulated learning: A natural formula for connecting formal and informal learning. *The Internet and Higher Education*, 15(1), 3-8. <https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2011.06.002>
- Darling-Hammond, L., Hyster, M. E., & Gardner, M. (2017). *Effective teacher professional development*. Learning Policy Institute. <https://doi.org/10.54300/122.311>
- Freire, P. (2005). *Pedagogy of the oppressed* (M. B. Ramos, Trans.; 30th anniversary ed.). Continuum. (Original work published 1970)
- Habermas, J. (1989). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society* (T. Burger & F. Lawrence, Trans.). MIT Press. (Original work published 1962)
- Herianto, E. (2022). *Pendidikan kewarganegaraan digital*. Widina Bhakti Persada.
- Khairunisa, W., & Damayanti, S. (2023). Pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi suatu negara pada generasi milenial abad-21. *Jurnal Ideas: Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 9(1), 35-46. <https://doi.org/10.32884/ideas.v9i1.1209>
- Kirani, A. P., dkk. (2022). Pentingnya pendidikan kewarganegaraan sebagai pedoman dalam menghadapi era Society 5.0. *Jurnal Educatio*.
- Kusumawardani, S., Budimansyah, D., Triyanto, & Wibowo, W. (Eds.). (2024). *Buku ajar MKWK pendidikan kewarganegaraan*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Maftuhin, Azis, A., & Nugraha, D. M. (2021). Citizenship education in the COVID-19 era: How to become a digital citizen? *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(2), 207-216. <https://doi.org/10.21831/jc.v18i2.40833>
- O'Brien, D., & Scharber, C. (2008). Digital literacies go to school: Potholes and possibilities. *Journal of Adolescent & Adult Literacy*, 52(1), 66-68. <https://doi.org/10.1598/JAAL.52.1.7>
- Rachmawaty, S. (2023). Paradigma pendidikan kewarganegaraan dalam membangun karakter generasi penerus bangsa. *JPKP: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik*, 1(1), 34-42.
- Ribble, M. (2011). *Digital citizenship in schools: Nine elements all students should know* (2nd ed.). International Society for Technology in Education (ISTE).
- Sari, G. I., Winasis, S., Pratiwi, I., & Nuryanto, U. W. (2024). Strengthening digital literacy in Indonesia: Collaboration, innovation, and sustainability education. *Social Sciences & Humanities Open*, 10(1), 101100. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2024.101100>
- Thomas, J. W. (2000). *A review of research on project-based learning*. The Autodesk Foundation.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.
- Westheimer, J., & Kahne, J. (2004). Educating the "good" citizen: Political choices and pedagogical goals. *PS: Political Science & Politics*, 37(2), 241-247. <https://doi.org/10.1017/S1049096504004160>